



BUMDes Untuk Desa: Kinerja BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian di Yogyakarta

Deni Setiawan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: December 13, 2020

Revised: May 02, 2021

Accepted: June 25, 2021

Available online: June 30, 2021

KEYWORDS

Village, Performance, Village-owned enterprise

CORRESPONDENCE

E-mail: deni.mip30@gmail.com

A B S T R A C T

BUMDes in DIY Yogyakarta has the potential and opportunities to be developed because villages in DIY Yogyakarta need effective guidance and management for the welfare of village communities through the BUMDes Village Law number 6 of 2004, the government makes a policy whereby villages should be able to establish BUMDes, but Yogyakarta Yogyakarta still has villages that do not yet have BUMDes especially in villages that have the potential to develop business types. This research is descriptive qualitative research that aims to describe the role of BUMDes Amarta, Srimartani Makmur and Panggunglestari in improving the village economy. This can be seen from the type of business being developed. The population in this study were BUMDes members consisting of 3 (three) villages. Data were collected through interviews with BUMDes members and analyzed using Nvivo 12 plus descriptively. BUMDes Amarta, Srimartani, and Panggunglestari have their ideas and characteristics. 3 factors influence the performance of BUMDes, namely individual factors, psychological factors, and organizational factors. The results show that individual factors have a large or dominant role in efforts to improve the village economy.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan aturan tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut adalah upaya pembangunan bidang ekonomi desa melalui adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ([Ihsan, 2018](#)). Tujuan dari pentingnya keberadaan BUMDes di setiap desa adalah kemandirian desa. Kemandirian adalah bentuk langkah yang dilaksanakan dari pemerintah untuk masyarakat dalam melakukan berbagai agenda sebagai upaya melaksanakan berbagai kepentingan sendiri ([Mufidah & Sari, 2017](#)). BUMDes juga bertujuan untuk menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan ([Artanaya & Yadnyana, 2016](#)). Selain sebagai langkah untuk menurunkan fungsi *free-rider* yang acapkali menaikkan dana transaksi untuk agenda masyarakat melalui praktek rente dibidang ekonomi ([Mustanir, 2019](#)).

Sumberdaya dengan sumberdaya alam melimpah yang dimiliki oleh desa maka desa hanya akan menjadi arena eksplorasi perusahaan besar dan asing ([Rukajat, 2013](#)). Kehadiran BUMDes yang kuat meskipun bermodal lebih kecil dapat menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan nasional agar desa dapat mandiri dan berdaya dengan bergeraknya dinamika ekonomi desa melalui perusahaan desa ([Nursetiawan, 2018a; Rukajat, 2013](#)). Oleh karena itu, Keberadaan BUMDes dapat meningkatkan perekonomian desa agar terciptanya lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan masyarakat ([Dewi, 2018](#)). Dalam hal ini, pemerintah desa sangat dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif agar pembangunan desa yang dikelola oleh BUMDes dapat menghasilkan barang dan jasa. Selain itu dapat meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan sehingga terciptanya iklim usaha yang menguntungkan bagi masyarakat sebagai penerima layanan ([Irawati & Martanti, 2017](#)).

Pengelolaan BUMDes yang dikelola secara profesional menerapkan prinsip saling bekerja sama, terbuka, emansipatif, akuntabel, dan berkelanjutan berbasis masyarakat untuk pengembangan usaha ([Mustanir, 2019](#)). Pembangunan daerah yang dipelopori oleh BUMDes menjadi sangat penting untuk mendorong terciptanya sektor swasta dalam pedesaan yang membuat biaya produksi relatif rendah ([Kusuma et al., 2018](#)). Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional serta mandiri. BUMDes diinisiasi oleh masyarakat bertujuan untuk kebutuhan desa dan potensi desa yang sekiranya dapat dikembangkan menjadi pendapatan desa. Prinsip-prinsip dasar dari BUMDes bekerja sama, terbuka, emansipatif, akuntabel dan sustainable berbasis masyarakat untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan ([Fitriska, 2017](#)).

Tujuan didirikan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dari jenis usaha yang dijual ke pasar. Kehadiran BUMDes ditengah-tengah masyarakat menjadi penting karena sebagai penyedia layanan sosial yang bergerak dibidang bisnis atau usaha ([Sidik, 2015; Suwandi et al., 2019](#)). Selain itu, BUMDes sebagai pelopor atau pilar dalam organisasi sosial dan sangat komersil kehadirannya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat ([Singkoh, 2019](#)). BUMDes sebagai organisasi hukum mempunyai aturan yang berlaku, ketentuan bersifat mengikat karena terbentuknya atas dasar kesepakatan yang terbangun dari masyarakat desa ([Sukamto et al., 2019; Widiastuti et al., 2019](#)). Sebagai organisasi komersil tentunya BUMDes akan mencari keuntungan dari bisnisnya melalui mekanisme pasar yang berlaku ([Widiastuti et al., 2019](#)). BUMDes yang ada di Indonesia tentunya beragam dari bisnis atau jenis usaha yang dilakukan. Hal ini disesuaikan dengan potensi, sumberdaya dan karakteristik yang dimiliki dari masing-masing desa ([Sidik, 2015](#)).

Berdasarkan data yang diinformasikan diperoleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saat ini, perhitungan secara nasional terdapat 73.709 desa, di mana pada saat launching Indeks Pembangunan Desa menunjukkan angka sebesar 0,562 masih dalam kategori desa tertinggal ([Kusuma, et.al 2018](#)).

Tabel 1. Jenis Desa menurut IDM Tahun 2015

No	Jenis	Jumlah Desa	Percentase
1	Desa Mandiri	174	0.24
2	Desa Maju	3.608	5
3	Desa Berkembang	22.882	31
4	Desa Tertinggal	33.592	46
5	Desa Sangat Tertinggal	13.453	18

Sumber: Indeks Desa Membangun (2016)

Berdasarkan bagan di atas berdasarkan indeks Desa membangun. Perlu adanya upaya strategis mengatasi permasalahan desa terbelakang atau tertinggal dan menambah besaran desa berkembang serta mandiri. Data IDM ini sebagai pesan penting untuk membangun desa sesuai program unggulan pemerintah yaitu Nawacita Prioritas, diantaranya: (1) penyaluran dana desa Rp 1.4 miliar secara bertahap, (2) Pengembangan BUMDes sejumlah 5000. Hasilnya sangat luar biasa selama 5 tahun terakhir menunjukkan hasil positif di mana 1022 BUMDes di tahun 2004 sekarang melebihi rencana awal sekitar 5000 BUMDes, mencapai 45.549 BUMDes pada tahun 2018 akhir ([Nursetiawan, 2018; Sidik, 2015](#)). Keberadaan BUMDes sangat strategis dikarenakan peran penting menjadi penopang ekonomi yang berada di desa. Undang-Undang sebenarnya sudah ada sebelumnya, tetapi BUMDes sebagai penyokong ekonomi desa baru diatur dalam berbagai peraturan baik itu peraturan menteri yang berkaitan tentang pendirian, pengelolaan dan pengurusan serta pembubaran BUMDes itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 ([Widiastuti, et.al 2019](#)).

Perspektif selanjutnya adalah tentang BUMDes yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung ([Anggraeni, 2016](#)). Beberapa unit usaha yang didirikan BUMDes memberi peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan baru serta membantu masyarakat melihat peluang potensi yang ada. Program serta pendampingan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar terciptanya masyarakat desa yang memiliki daya saing tinggi, mandiri, sejahtera dan berkualitas ([Shohibuddin, et.al 2017](#)). Salah satu sebabnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya pengetahuan masyarakat desa dalam mengakses informasi terkait BUMDes.

Menurut ([Widiastuti et al., 2019](#)) Pengelolaan BUMDes dilaksanakan dengan beberapa peluang meskipun siklusnya secara bisnis memiliki perbedaan karakteristik antara UKM dengan BUMDes karena orientasinya UKM mencari keuntungan sedangkan BUMDes arahnya lebih kepada *social enterprise* atau bisnis social. Pertama; Tata kelola BUMDes harus lebih akuntabel secara finansial. Kedua; BUMDes secara tata kelola lebih membahas secara parsial, contohnya akuntabilitas ([Hasanah, 2019](#)). *Social enterprise* sebagai suatu tata kelola sudah dipraktikkan oleh Negara lain, misalnya Negara Inggris tetapi

memiliki perbedaan dalam lingkup sosial budaya dan lingkungan sosial yang jauh berbeda dengan di Indonesia ([Mswaka & Aluko, 2015](#)).

BUMDes menjadi katalisator untuk mencapai desa mandiri agar terbentuknya kelompok masyarakat agar desa produktif dalam bekerja di bidang pertanian, lingkungan hidup dan lain-lain. Partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes sangat diperlukan dikarenakan menjadi penentu tingkat keberhasilan dalam program pembangunan desa ([Nursetiawan, 2018](#)). Program yang dijalankan ini harus sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai subjek dan objek dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Saat ini, partisipasi dan masyarakat dalam pengembangan usaha masih relatif rendah secara perencanaan, sehingga perlu adanya *monitoring* untuk mengevaluasi dampak dari kegagalan pengelolaan BUMDes ([Mufidah & Sari, 2017](#)).

Data terbaru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) pada tahun 2019, jumlah BUMDes diseluruh indonesia saat ini mencapai 41.000 unit dari total 74.957 desa yang tersebar seluruh Indonesia. Artinya hampir 70 % desa di seluruh Indonesia sudah memiliki BUMDes. Pertumbuhan BUMDes mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan hal ini akan berdampak positif apabila dikelola secara baik akan meningkatkan perekonomian desa tersebut. Bahkan, dari lima BUMDes terbaik di Indonesia menurut Kemendes PDT, dua diantaranya merupakan BUMDes yang berada di Yogyakarta yaitu BUMDes Tirto Nirmolo yang terletak di Desa Kasihan Kabupaten Bantul yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan omzet mencapai 8.7 miliar rupiah dan BUMDes Sejahtera Bleberan di Desa Bleberan Kabupaten Gunung Kidul yang bergerak di bidang wisata air terjun Sri Getuk dengan omzet 2 miliar rupiah per tahun.

Berdasarkan hal di atas, peneliti melihat bahwa masih banyak BUMDes yang belum terbentuk di desa masing-masing Provinsi Yogyakarta. Selain itu, juga masih banyak desa yang Kinerja BUMDes belum berdampak positif dalam peningkatan perekonomian desa. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa tentang “Kinerja BUMDes dalam meningkatkan Perekonomian Desa (Studi Kasus Kinerja BUMDes Panggunglestari di desa Panggungharjo, BUMDes AMARTA di desa Pandowoharjo dan BUMDes Srimartani di desa Srimartani)

Penelitian yang dilakukan di BUMDES di desa Kedungripen dan desa Ngringinejo mengalami beberapa permasalahan karena terjadi benturan kepentingan antara aktor internal, yaitu antara aktor tunggal atau utama serta pemerintahan desa yang terkesan tertutup dan kurang melibatkan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan ([Anggraeni, 2016](#)). Permasalahan inti yang dialami BUMDes yaitu komunikasi kelompok masyarakat, keterbukaan informasi dari pemerintah desa ([Sukamto et al., 2019; Widiastuti et al., 2019](#)). Hasil penelitian ini terjadi ketidaksesuaian laporan di dalam pelaksanaan dan pemasukan serta pengeluaran dana ditambah dengan tidak didukung oleh bukti. Selain itu, tidak adanya laporan bulanan mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak berjalan sesuai harapan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) BUMDes di Provinsi DIY Yogyakarta yaitu (1) BUMDes Amarta di desa Pandowoharjo Kabupaten Sleman;(2) BUMDes Srimartani Makmur, Desa Srimartani Kabupaten Bantul;(3) BUMDes Panggunglestari, Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul. Metode penelitian

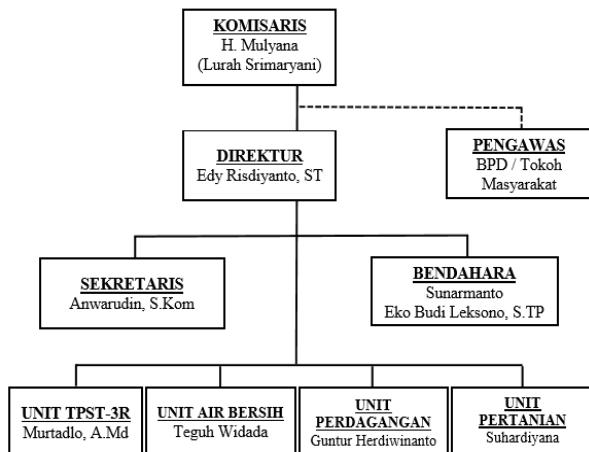
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif (Mohajan, 2018). Penelitian ini untuk melihat suatu gejala nyata yang dapat diamati dikehidupan nyata. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang terdiri dari jurnal, buku-buku serta literatur yang terkait dengan pembahasan BUMDes. Pihak-pihak yang terkait dalam fokus penelitian ini adalah pihak anggota BUMDes dari desa masing-masing. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu strategi multi metode yang memungkinkan melakukan paduan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, media massa, studi dokumenter dan lain-lain (Rukajat, 2013). Selanjutnya, menganalisa data kualitatif menggunakan software NVivo yang mengatakan bahwa Nvivo relatif mudah digunakan, sehingga dimungkinkan untuk mengimpor dokumen langsung dari pengolah kata dengan mudah di layer (Bazeley, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja adalah capaian untuk mewujudkan agenda tujuan visi dan misi dari sebuah organisasi (Widiastuti et al., 2019). Selain itu kinerja merupakan sebuah perencanaan yang strategis dari organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan visi dari sebuah organisasi sangat ditentukan oleh program-program yang sangat matang (Sidik, 2015), sumberdaya manusia yang sesuai dengan keahliannya serta tepat dengan lingkungan sekitar dan kinerja dari sebuah organisasi tersebut sehingga visi dan misi sebuah organisasi terwujud:

Profil Desa Amarta

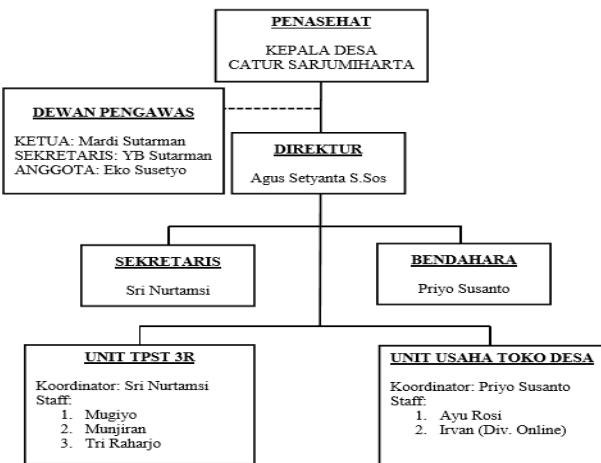
BUMDes Amarta berdiri pada tanggal 6 juni 2016 terletak di desa Pandowoharjo, kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. BUMDes ini merupakan hibah dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sleman yang mengalami beberapa kendala dan sempat “vakum”. Tetapi setelah dihibahkan ke desa Pandowoharjo masyarakat langsung memanfaatkan aset yang diberikan seperti bangunan, peralatan, tenaga kerja yang dikelola secara profesional untuk dijadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola secara mandiri. BUMDes Amarta bergerak dibidang pengelolaan sampah dengan model pengutipan atau pengambilan sampah dengan cara bermitra dengan Pengepul Sampah Mandiri (PSM) yang berasal dari masyarakat desa Pandowoharjo. Jenis sampah anorganik dijual ke pengepul sampah sedangkan sampah anorganik diolah menjadi pupuk.



Gambar 1: Struktur Desa Amarta

Sumber: Kantor BUMDes Amarta (2021)

Profil BUMDes Srimartini Makmur



Gambar 2: Struktur Organisasi BUMDes

Srimartani Makmur (2021)

Sumber: Kantor BUMDes Srimartani Makmur

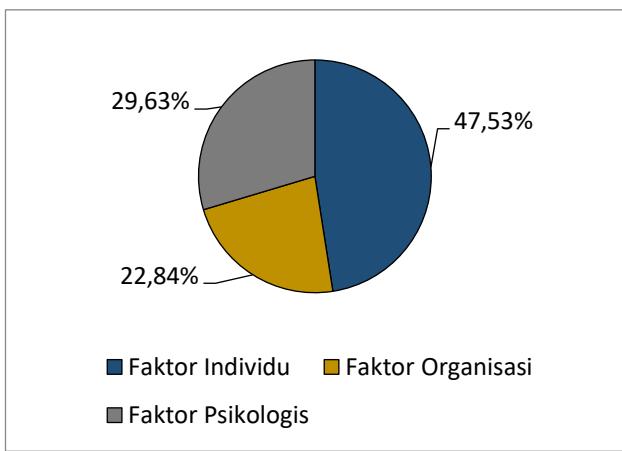
BUMDes ini berdiri pada 28 November 2016 di Desa Srimartini, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul. Ada 6 (enam) jenis Usaha yang dikelola oleh BUMDes Srimartini Makmur produk UKM, pengelolaan pasar milik desa, jasa layanan E-Warong dan POB, Sampah terpadu, laboratorium hortikultura modern serta pengelolaan air bersih dengan jumlah pegawai 7 orang yang terdiri dari 3 pengelola dan 4 karyawan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam menjalankan organisasi harus memiliki visi misi yang jelas karena dua hal ini sangat fundamental untuk menjadi pondasi atau corong sebagai pemompa semangat kerja dari sebuah organisasi agar tercapai tujuannya, begitu juga untuk BUMDes Srimartini Makmur.

Profil BUMDes Panggungharjo

BUMDes Panggungharjo memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara memanfaatkan aset dan potensi desa. Saat ini BUMDes memiliki beberapa jenis usaha seperti program “KUPAS” bergerak di bidang pengelolaan sampah dan dibentuknya bank sampah, swadesa atau swalayan untuk menjamin dagangan di pasar serta mengelola barang dagangan masyarakat dan lahan parkir rumah makan. Desa wisata “Kampung Mataram” berbasis pendidikan atau pengetahuan, kuliner masyarakat berbasis agraris, biji nyamplung diolah menjadi minyak dengan cara dikeringkan. Selain itu, ada juga pengelolaan minyak goreng bekas yang telah bekerja sama dengan perusahaan danone aqua untuk dijadikan bahan bakar.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja BUMDes

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) lokasi yang berbeda-beda, sehingga hasil yang didapatkan mampu memberikan data sesuai ditemukan di lapangan. Menurut Gibson di dalam pertiwi, kinerja dapat dipengaruhi atau diukur dengan beberapa faktor individu, faktor psikologis dan faktor organisasi. Terdapat 3 Indikator-indikator BUMDes dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3: Indikator BUMDes

Sumber: Analisis Nvivo 12 plus Crosstab Query (2021)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa faktor individu memiliki pengaruh besar atau dominan dalam sebuah kinerja organisasi. BUMDes merupakan organisasi yang dimiliki oleh desa untuk meningkatkan perekonomian desa harus didukung oleh beberapa faktor. Dengan demikian, faktor individu menjadi besar pengaruhnya karena pegawai yang bekerja di BUMDes memiliki etos kerja yang baik dan adanya kemauan yang besar untuk berkontribusi di desanya. Faktor individu ini memiliki 3 variabel di dalamnya yaitu pengalaman kerja, keterampilan serta tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa individu atau orang yang bekerja di BUMDes memiliki *passion* untuk kepentingan sosial masyarakat, sehingga akan bekerja semaksimal mungkin meskipun harus merintis BUMDes dari tahap awal. Hal ini sesuai dengan teori motivasi dari (Locke dan Latham:2004) mengatakan efektivitas kerja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sehingga pegawai akan bersemangat dalam menjalankan pekerjaan. Faktor internal ini meliputi diri sendiri, memiliki kesadaran dan semangat kerja dari pegawai untuk kepentingan social. Selain itu pengalaman kerja sangat berpengaruh besar untuk menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan kinerja pegawai BUMDes. Pengalaman kerja dari setiap pegawai sangat bermanfaat untuk kinerja pegawai di saat pegawai masing tergolong muda dan bertukar pengalaman dengan pegawai yang sudah senior sehingga terjadi penambahan wawasan pengetahuan untuk pegawai BUMDes. Semangat kerja karena memiliki *passion* sangat membantu BUMDES mengembangkan potensi desa untuk kepentingan sosial dari masing-masing desa. Pengalaman kerja pegawai sangat mendukung *passion* karena dari pengalaman dapat mengerjakan tugasnya secara lebih efektif dan efisien. Keterampilan disini menjadi penting dan sangat mempengaruhi kinerja pegawai dengan memberikan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan. Tingkat pendidikan pegawai sangat berperan penting dalam kinerja sebuah organisasi, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin tinggi tingkat persaingan antar pegawai berdampak terhadap persaingan yang baik untuk dapat meningkatkan kinerja BUMDes.

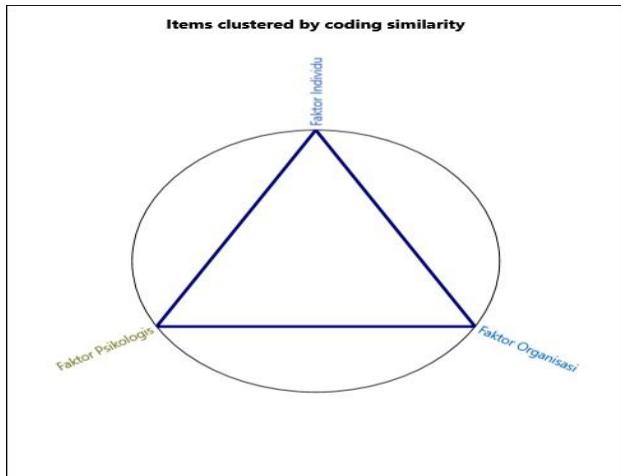
Kinerja BUMDes dapat meningkatkan perekonomian desa dengan melihat kepribadian para pegawai karena kepribadian ini menjadi faktor pendorong atau penghambat dari sebuah organisasi dilihat dari sikap dan tingkah laku yang di tunjukkan oleh para pegawai dalam menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Selain itu, aspek kepribadian yang

meliputi tanggung jawab seperti komitmen dalam menjalankan setiap tugas yang telah diberikan dan kerjakan secara maksimal. Adanya ketulusan yang berarti setiap pegawai diharapkan mampu untuk bekerja dengan hati tanpa mengharapkan imbalan, dimana ketulusan ini sangat erat kaitannya dengan *passion* yang dimiliki oleh pegawai BUMDes. Memiliki keseriusan dimana pegawai BUMDes mampu bekerja dengan sungguh-sungguh dan focus pengembangan potensi desa dan usaha ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja yang baik dari ketiga BUMDes sangat dipengaruhi faktor kepribadian yang terdapat pada BUMDes dengan berbagai karakteristik. Artinya, faktor kepribadian pegawai yang baik sangat di utamakan di dalam organisasi yang bergerak di bidang sosial seperti BUMDes, karena dapat meningkatkan kinerja di BUMDes.

Menilai kinerja BUMDes berdasarkan faktor psikologis berdasarkan lingkungan kerja sangat mempengaruhi kinerja BUMDes pada saat lingkungan kerja yang kondusif atau baik sehingga berdampak positif yang berarti dapat memperbaiki moral kerja pegawai. Hal ini disebabkan dalam kegiatan bekerja memiliki semangat dan akhirnya berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi. komunikasi yang baik antar pegawai untuk saling kenal satu sama lain agar tidak ada hal kecurigaan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja BUMDes. Selanjutnya faktor psikologis ada di dalamnya kepuasan kerja dimana untuk menggambarkan perasaan seseorang berdasarkan perilaku atau sikapnya. Setiap individu atau orang memiliki kepuasan kerja yang berbeda-beda karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda tergantung dari pekerjaan, rekan kerja serta upah atau imbalan yang diterima. Dengan dilihat bahwa *passion* dari pegawai BUMDes memiliki dorongan besar untuk meningkatkan masing-masing BUMDes, dimana dalam menjalankan *passion* Pegawai ini bukan semata-mata mencari profit atau keuntungan melainkan untuk bagaimana mereka dapat mengabdi atau berkontribusi kepada lingkungannya, dalam kasus ini untuk desa mereka masing-masing.

Selanjutnya faktor organisasi sangat mempengaruhi kinerja BUMDES. Kepemimpinan faktor utama untuk dapat meningkatkan kinerja bawahannya untuk dapat giat bekerja, disiplin dalam bekerja dan supaya bawahannya tidak bermasalah dalam menjalankan pekerjaan yang telah diberikan. Pengaruh dari pimpinan diharapkan dapat dimanfaatkan dimana seseorang pemimpin dapat menjadi contoh untuk mempengaruhi *mood* bawahannya dalam bekerja. Pemimpin mempunyai kharismatik dan mempunyai visi dan misi yang jelas sehingga mampu mengkomunikasikan secara efektif. Pemimpin harus dapat menjadi teladan, memiliki ketegasan sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan kinerja. Dalam menjalankan roda organisasi sangat diperlukannya struktur organisasi sehingga dapat dilakukan pembagian kerja dari masing-masing pegawai. Selain itu, fungsi struktur organisasi untuk menjelaskan hubungan serta wewenang kepada siapa melapor pada setiap pekerjaan mereka. Berdasarkan analisa dimana dari ketiga BUMDes telah memenuhi struktur organisasi sesuai dengan amanat peraturan desa yakni Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Imbalan atau gaji pokok sangat penting sebagai upaya yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja

serta kepuasan kerja untuk para pegawainya. Imbalan ini berupa upah kerja sesuai dengan peraturan yang telah disepakati, ada upah perjam, perhari, perbulan ada juga bonus yang didapatkan. Sistem ini dibuat atau dirancang dengan tujuan dapat memacu motivasi dalam bekerja agar para pegawai dapat memberikan performa terbaik atau dapat membuat pegawai betah dalam bekerja sehingga tidak tertarik untuk mengundurkan diri.



Sumber: Cluster Analisis Nvivo 12plus, 2021

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa faktor individu, organisasi dan psikologi saling berkaitan satu dengan yang lain dalam meningkatkan kinerja apabila dilihat dari persamaan. Namun sebaliknya, faktor yang paling dominan yaitu faktor individu dimana di dalamnya ada pengalaman kerja, keterampilan dan pendidikan yang sangat mendominasi untuk meningkatkan kinerja. BUMDes menjadi motor penggerak paling dasar untuk perekonomian desa, penelitian ini menjadi salah satu contoh agar ke depannya BUMDes yang ada di Indonesia menjadi garda terdepan untuk memajukan indonesia dimulai dari desanya masing-masing.

KESIMPULAN

BUMDes diseluruh Indonesia telah mengalami perkembangan sangat pesat hal ini dilihat dari kenaikan jumlah pada setiap tahunnya. Keberadaan BUMDes di provinsi DIY Yogyakarta dapat diterima sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, namun masih terdapat desa di Provinsi Yogyakarta termasuk desa yang memiliki potensi belum membentuk BUMDes. BUMDes bagian dari pilar ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersil yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan kontribusinya sebagai penyedia layanan sosial. Selain itu, tujuan didirikan BUMDes untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes merupakan organisasi yang dimiliki oleh desa untuk meningkatkan perekonomian desa harus didukung oleh beberapa faktor individu, psikologis dan organisasi.

BUMDes Amarta, BUMDes Srimartani Makmur dan BUMDes memiliki karakteristik masing-masing, dari jenis usaha yang dilaksanakan, hasil yang didapatkan juga berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan perekonomian di desanya masing-masing faktor yang paling dominan yaitu faktor individu dimana di dalamnya ada pengalaman kerja, keterampilan dan pendidikan yang sangat mendominasi untuk meningkatkan kinerja. BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak paling dasar untuk perekonomian desa, penelitian ini menjadi salah satu contoh

agar ke depannya BUMDes yang ada di Indonesia menjadi garda terdepan untuk memajukan indonesia dimulai dari desanya masing-masing.

BUMDes Amarta, BUMDes Srimartini dan BUMDes Panggungharjo untuk terus-menerus berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mengembangkan potensi dan peluang dari jenis usaha sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa dengan menggandeng beberapa pihak agar nilai usaha yang dilakukan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pelatihan, partisipasi dan pemberdayaan harus terus dilakukan agar dari masing-masing desa dapat terus berkontribusi dan berperan aktif untuk mengembangkan BUMDes baik itu sebagai anggota dan mendukung penuh kegiatan yang dilakukan BUMDes.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, hingga peneliti sangat memberi rekomendasi untuk mengatur sebagian agenda dapat dipertimbangkan yang dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk penelitian sejenis dalam penelitian selanjutnya, yaitu; (1) peneliti menggunakan penelitian yang lebih luas objeknya untuk memberikan data yang detail sehingga hasilnya lebih komprehensif; (2) wawancara dilakukan sebagai media agar mendapatkan data yang rata-rata diwakili oleh orang lain. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dibutuhkan waktu yang tepat agar wawancaranya dapat lebih optimal. Selain itu, banyak dari pihak anggota tidak terlalu kooperatif sehingga penyajian data tidak terlalu komprehensif.

REFERENSI

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUMDES DI GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA. MODUS, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Artanaya, P. Y., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh Partisipasi Pemakai Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Dengan Kemampuan Pemakai Sebagai Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi, 15(2), 1482–1508.
- Bazeley, P. (2013). Qualitative Data Analysis with NVivo (second edition) Pat Bazeley.
- Dewi, H. (2018). ULTIMA Management | ISSN 2085 - 4587. 10(2), 81–96.
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. 5(2), 29–34.
- Hasanah, N. (2019). ... Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Melirang Kecamatan Bungah QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine) Vol. 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/268132934.pdf>
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies, 7(4), ll.
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). BUMDes TERHADAP PELAPORAN ASET DESA (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). Snaper-Ebis 2017, 2017, 27–28.
- Kusuma, B., Sri Widodo, M., & Fariedah, F. (2018). Kajian Potensi Ekowisata berbasis Perairan di Kecamatan Glagah dan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. JFMR-Journal of Fisheries and Marine Research, 2(3).

- <https://doi.org/10.21776/ub.jfmr.2018.002.03.3>
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. *UTC Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48.
- Mswaka, W., & Aluko, O. (2015). Corporate governance practices and outcomes in social enterprises in the UK: A case study of South Yorkshire. *International Journal of Public Sector Management*, 28(1), 57–71. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2014-0048>
- Mufidah, I., & Sari, M. M. K. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT JAMBANGAN RW 03 DALAM MEWUJUDKAN SURABAYA KOTA LAYAK ANAK MELALUI PROGAM INISIASI KAMPUNG 'E AREK SUROBOYO (IKAS) Immarotul Mufidah Maya Mustika Kartika Sari Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 05 Nomor 02 Tahun 2017 , 130-14. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 05(02), 130–144.
- Mustanir, A. (2019). Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Kelompok Ekonomi Kewirausahaan Secara Partisipatif Empowerment of Badan Usaha Milik Desa Through Participatory Entrepreneurship Economic Groups Unggul , Profesional , Islami Unggul , Profesional , Islami. *Jurnal*, February, 2–44. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pwb2g>
- Nursetiawan, I. (2018a). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Nursetiawan, I. (2018b). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Rukajat, A. (2013). Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Untuk Meningkatkan Mutu Hasil Pembelajaran. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 85–111.
- Shohibuddin, M., Cahyono, E., & Bahri, A. D. (2017). Undang-Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi? *Wacana*, 19(36), 29–81.
- Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 115. <https://doi.org/10.22146/jkap.7962>
- Singkoh, F. (2019). Issn :2337 - 5736. 3(3), 1–11.
- Sukamto Satoto, Afif Syarif, Dhil's Noviades, Fitria, R. M. (2019). *Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Suwandi, I., Arifanti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>